

ABSTRAK

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya masih dapat ditingkatkan pungut yang didukung dengan pengawasan secara intensif terhadap petugas lagi dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para wajib pajak melalui kring atau kepala desa, serta system pengelolaan keuangan dengan memberikan insentif atau upah pungut bagi petugas pungut dan penyetorannya ke bank tempat pembayaran. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN BREBES**. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengintensifkan dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Brebes ? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah dalam mengintensifkan dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan sosilogis/ empiris atau lebih dikenal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat sebagai penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara teori dasar hukum dalam kaitannya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Brebes. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung dengan analisis kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Brebes dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : Kebijakan pelayanan pajak terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes secara normative didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Brebes antara lain : hambatan yuridis, meliputi : tertib hukum, pelaksanaan hukum, hambatan teknis meliputi : kurang optimalnya pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, upaya-upaya tersebut antara lain: memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada wajib pajak, memberikan edaran kepada wajib pajak secara tertib dan tepat, rajin membuat rekap/pendapatan yang benar tentang wajib pajak dengan menyiapkan surat pemberitahuan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di tiap wilayah Kecamatan/ Kelurahan/Desa, RT, maupun RW. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan melakukan MOU dengan Kejaksaan Negeri Brebes dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Kata kunci : Intensifikasi, ekstensifikasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Daerah, dan Kabupaten Brebes.

ABSTRACT

Acceptance of Land and Building Tax is basically still be improved adoptee are supported with intensive monitoring of the officer again by intensification ekstensifikasi land and building tax to the taxpayers through the fuse or tripped village heads, as well as the system of financial management by providing an incentive or reward pungut for the collection and remittance clerk to the bank where the payment. Based on the above reasoning, the authors are interested in doing research with the title: **INTENSIFICATION AND TAX EXTENSIFICATION BANGUNANDALAM EARTH AND REGIONAL EFFORTS TO INCREASE REVENUE IN THE DISTRICT BREBES**. Based on the above description, a problem can be formulated as follows: How is the effort made by the Government of Brebes in intensifying and extending the land and building tax in order to increase the regional revenue in Brebes? Any obstacles facing the Government in intensifying and extending the land and building tax in Brebes

This study is a legal approach sosilogis / empirical or better known as the sociological juridical approach. This study is a descriptive analytical research, which illustrates the basic theory of law in relation to the intensification and extension of land and building tax in order to increase regional revenue in the District Brebes. Analisa data using qualitative analysis method that is supported by the analysis kuantitatif.

Based on the results of research and discussion in the previous chapter, the intensification and extension of land and building tax dala order to increase regional revenue Brebes conclusion can be drawn as follows: Policy tax services to instensifikasi and extensive land and building tax in Brebes is normative is based on tax regulations. Hambatan constraints faced by the government in instensifikasi and extending the land and building tax in Brebes, among others: the obstacles juridical, include: rule of law, the conduct of the legal, technical barriers include: less optimal service performed by the Tax Office, these efforts between other: provide counseling and guidance to taxpayers, giving a circular to taxpayers in an orderly and proper, diligent make recap / income right about taxpayers by preparing the draft notices and Building tax in each subdistrict / Village / Desa, RT, and RW. Efforts Brebes District Government through the Department of Revenue and Finance management did MOU with the State Attorney Brebes and PT. Central Java Regional Development Bank.

Key words: intensification, ekstensifikasi, Land and Building Tax, Local Revenue, and Brebes.